

PENGARUH PHR DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP PAD SERTA PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI BALI

Made Dylla Tesyaningrum¹
I K. G. Bendesa²

^{1,2}Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Udayana (Unud), Bali, Indonesia
e-mail: _tesya_dylla@yahoo.com / telp. 081236864131

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Pajak Hotel dan Restoran (PHR), jumlah penduduk dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Penelitian ini dilakukan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumen-dokumen yang terdapat di Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. Metode analisis yang digunakan *path analysis*. Hasil analisis menunjukkan bahwa PHR berpengaruh positif dan langsung terhadap PAD, sementara jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap PAD. Pada uji selanjutnya, variabel PHR, jumlah penduduk dan PAD memiliki pengaruh positif dan langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Variabel PAD merupakan variabel intervening pengaruh positif dan tidak langsung PHR dan jumlah penduduk terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Pengaruh tidak langsung PHR terhadap pertumbuhan ekonomi melalui PAD sebesar 0.035, mempunyai arti bahwa pengaruh tidak langsung PHR terhadap pertumbuhan ekonomi melalui PAD adalah sebesar 3,5 persen. Nilai pengaruh tidak langsung jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi melalui PAD sebesar 0.007, mempunyai arti bahwa pengaruh tidak langsung jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi melalui PAD sebesar 0,7 persen.

Kata Kunci: pajak hotel dan restoran, jumlah penduduk, pendapatan asli daerah, pertumbuhan ekonomi

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze the effect of tax on hotel and restaurant (PHR), population and revenue (PAD) on economic growth at the Regency / City in the province of Bali. This research was conducted at the Regency / City in the province of Bali. Data collected through the documents contained in the Central Bureau of Statistics of Bali Province. The analytical method used path analysis. The analysis showed that the PHR have positive effect direct on the PAD, while the number of the population has no effect on PAD. In the next test, PHR variables, population and PAD have a positive and direct effect on Economic Growth in Regency / City in the province of Bali. Variable PAD is an intervening variable and indirect positive influence PHR and the number of people on the Growth PHR Ekonomi. Pengaruh indirectly to economic growth through the revenue of 0035, means that the PHR indirect effect on growth by PAD is at 3.5 percent. The value of the indirect effect of population on the amount of economic growth through the revenue of 0007, means that the indirect effect of a population to economic growth through revenue by 0.7 percent.

Keywords: hotel and restaurant taxes, population, regional income, economic growth

PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan wewenang pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus daerahnya sendiri, sesuai dengan Undang- Undang Nomor 32

Tahun 2004. Tujuan otonomi daerah adalah untuk memaksimalkan pembangunan daerah, laju pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan antar daerah dan meningkatkan pelayanan publik (Andirfa, 2009). Menurut Lin dan Liu (2000), menyatakan bahwa desentralisasi fiskal dapat memberikan perubahan yang berarti untuk perekonomian di suatu daerah. Desentralisasi fiskal adalah strategi yang efektif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan (Malik et al., 2006).

Pemberian otonomi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangannya sendiri dan membuat kebijakan-kebijakan yang berpengaruh pada kemajuan daerahnya (Widiana, 2015). Pertumbuhan ekonomi akan mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Wahyuni, 2014). Secara umum, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Sukirno, 2006: 9). Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi jika jumlah produksi barang dan jasa meningkat. Tujuan utama dari pertumbuhan ekonomi adalah ingin melihat apakah kondisi perekonomian semakin membaik (Manurung, 2008: 131). Ukuran baik buruknya dapat dilihat dari struktur produksi (sektoral) atau daerah asal produksi (regional). Dengan melihat struktur produksi dapat

diketahui apakah ada sektor yang terlalu tinggi atau terlalu lambat pertumbuhannya.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator lain yaitu distribusi pendapatan (Nelly, 2007). Pertumbuhan ekonomi daerah diproksikan dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan total atas keseluruhan nilai barang dan jasa yang diperoleh dari seluruh kegiatan perekonomian yang dilakukan di daerah. Tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dihitung dengan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB digunakan sebagai ukuran penting yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi era otonomi daerah. PDRB perkapita merupakan nilai PDRB atas dasar harga berlaku dibagi jumlah penduduk disuatu daerah (KPPOD, 2003).

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa dari periode 2010-2014 menunjukkan adanya peningkatan pertumbuhan PDRB pada kabupaten/kota di provinsi Bali. PDRB kabupaten/kota di Bali tiap tahunnya terus mengalami peningkatan yang menandakan bahwa Bali telah berhasil menjalankan otonomi daerahnya dari berbagai sektor, seperti pada sektor pariwisata dan pajak kendaraan keduanya sama-sama penyumbang nilai yang besar untuk PDRB Bali. Rata-rata pertumbuhan PDRB tertinggi selama periode 2010-2014 pada kabupaten/kota di Bali yaitu pada Kabupaten Gianyar dengan rata-rata sebesar 11,85 persen. Sedangkan rata-rata terendah pertumbuhan PDRB yaitu pada Kabupaten Bangli yaitu sebesar 4,79 persen.

Tabel 1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Bali periode 2010-2014 (dalam persen)

No.	Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014
1	Jembrana	4.37	5.31	5.57	5.38	5.98
2	Tabanan	5.37	5.58	5.29	6.03	6.39
3	Badung	6.08	6.27	6.81	6.41	6.97
4	Gianyar	12.46	9.63	11.04	6.43	6.80
5	Klungkung	5.15	5.49	5.69	5.71	6.05
6	Bangli	4.74	5.52	5.65	5.61	5.83
7	Karangasem	4.85	4.93	5.42	5.81	6.16
8	Buleleng	5.53	5.76	6.12	6.71	6.96
9	Denpasar	6.17	6.34	6.70	6.54	7.00

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2015

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah yang bersangkutan yang terus diupayakan untuk ditingkatkan seoptimal mungkin dalam rangka mewujudkan semangat kemandirian lokal. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber yang memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap APBD. Pada Tabel 2 adalah APBD tahun 2014.

Pada Tabel 2 ditunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pemprov Bali selama tahun anggaran 2014 mencapai Rp 4,58 trilyun. Sementara itu, belanja daerah Pemprov Bali pada tahun anggaran yang sama mencapai Rp 4,49 trilyun. Salah satu sumber pembiayaan pembangunan Pemprov Bali adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada tahun anggaran 2014, PAD masih merupakan sumber penerimaan rutin terbesar pemerintah Provinsi Bali yaitu sebesar Rp 2,92 trilyun, atau memberi kontribusi sekitar 63,80 persen dari total penerimaan. Untuk belanja daerah, porsi pengeluaran tertinggi digunakan untuk belanja langsung yang mencapai Rp 3,15 trilyun atau sekitar 70,16 persen dari total belanja daerah. Sisanya sebanyak Rp 1,34 trilyun (29,84%) digunakan untuk belanja

tidak langsung.

Tabel 2. Ringkasan Realisasi APBD Provinsi Bali Tahun 2014 (dalam Ribu Rupiah)

I. Penerimaan Daerah	4.577.678.391
1. Pendapatan Asli Daerah	2.920.416.697
1.1. Pajak Daerah	2.517.432.371
1.2. Retribusi Daerah	71.324.628
1.3. Hasil perusahaan dan kekayaan milik daerah	89.7477.349
1.4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	241.912.350
2. Dana Perimbangan	1.018.431.009
2.1. Dana hasil pajak/Bukan pajak	144.532.786
2.2. DAU	832.297.473
2.3. DAK	41.600.750
3. Lain-lain pendapatan yang sah	638.830.685
II. Belanja Daerah	4.491.645.550
1. Belanja langsung	3.151.101.686
2. Belanja tidak langsung	1.340.543.865
III. Pembiayaan Pemerintah Daerah	819.709.937
1. Penerimaan Pembiayaan Daerah	1.039.709.937
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	220.000.000
IV. SILPA	905.742.777

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015

Menurut Mardiasmo (2002: 132) pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh sebagai sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Peningkatan pendapatan asli daerah diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah tersebut menjadi lebih baik dan dapat menciptakan pemerataan pembangunan ekonomi. Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran “horisontal” dan kewajaran “vertikal”.

Prinsip dari kewajaran horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat dalam posisi yang sama harus diberlakukan sama, sedangkan prinsip

kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak/non pajak (retribusi) untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan. Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada dasarnya diupayakan melalui kebijakan penataan peraturan daerah di bidang Pendapatan Asli Daerah, intensifikasi dan ekstensifikasi. PAD pada masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Bali secara rinci dari periode 2010-2014 dijabarkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali periode 2010-2014 (dalam Jutaan Rupiah)

No.	Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014
1	Jembrana	34.380	40.529	46.470	68.485	89.349
2	Tabanan	116.860	141.046	183.295	225.394	273.426
3	Badung	979.241	1.406.259	1.870.187	2.279.113	2.722.625
4	Gianyar	153.617	209.360	253.248	319.612	424.472
5	Klungkung	30.990	34.724	39.843	59.152	98.837
6	Bangli	16.329	22.961	40.751	55.986	76.141
7	Karangasem	62.696	129.556	144.037	168.652	239.425
8	Buleleng	86.962	109.167	129.003	160.292	219.682
9	Denpasar	260.482	424.962	511.326	658.974	698.739

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015

Berdasarkan Tabel 3 PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2010-2014 Kabupaten Badung dengan urutan pertama sebesar Rp. 2.279.113 juta rupiah, disusul oleh Kota Denpasar sebesar Rp. 658.974 juta rupiah dan terendah adalah Kabupaten Bangli yaitu sebesar Rp. 55. 986 juta rupiah. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari PAD. Menurut Mardiasmo (2002: 46), PAD memiliki peran utama dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka mencapai tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah dalam meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah.

Realisasi penerimaan PAD di Provinsi Bali rata-rata mengalami peningkatan pada masing-masing Kabupaten/Kota. Peningkatan pendapatan asli daerah diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah tersebut menjadi lebih baik dan dapat menciptakan pemerataan pembangunan ekonomi. Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh sebagai sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dalam menjalankan fungsinya dalam pelaksanaan otonomi daerah, daerah harus mampu mengenali potensi yang dimiliki untuk dikembangkan. Menurut Dispenda Provinsi Bali, pada penerimaan PAD di masing-masing Kabupten/Kota di Provinsi Bali penerimaan PAD bersumber dari 9 jenis pajak yang dikelola yaitu hotel, restoran, hiburan, penerangan jalan, parkir, reklame, air tanah, pajak bumi bangunan (PBB) dan bea perolehan atas hak tanah dan bangunan (BPHTB). Sedangkan 2 jenis pajak lainnya tidak dikelola karena potensinya tidak ada di wilayah Kabupaten/Kota di Bali.

Dari 8 Kabupaten dan 1 Kota yang ada di Bali 3 Kabupaten/Kota yang memperoleh penerimaan PAD tertinggi adalah di Kabupaten Badung, Kota Denpasar dan Kabupaten Gianyar. PAD Kabupaten Badung sudah mencapai Rp. 2.722.625 Juta pada tahun 2014, melebihi target yang telah ditetapkan pada tahun 2013, yaitu hanya sebesar Rp. 2.279.113 Juta atau meningkat 19,45 persen dari tahun sebelumnya. Adanya peningkatan PAD yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2013 sejalan dengan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam

rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah (LKPJ Kabupaten Badung, 2014).

Realisasi PAD Kabupaten Gianyar Pada Tahun 2014 meningkat cukup tinggi, yaitu sebesar Rp. 424.472 Juta atau sebesar 20,47% apabila dibandingkan dengan anggaran tahun sebelumnya. Adanya peningkatan PAD yang cukup signifikan dibandingkan Tahun 2013 karena adanya peningkatan kunjungan wisatawan. Hal ini menyebabkan peningkatan kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran adalah sebagai penyumbang terbesar terhadap perkembangan PAD Kabupaten Gianyar (LKPJ Kabupaten Gianyar, 2014).

Realisasi PAD terendah adalah Kabupaten Bangli. Meskipun penerimaan PAD sudah mencapai Rp. 76.141 Juta pada tahun 2014, dan sudah melebihi target yang telah ditetapkan pada tahun 2013, yaitu hanya sebesar Rp. 55.986 Juta atau meningkat 36,01 persen, tetapi dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali lainnya penerimaan PAD di Kabupaten Bangli masih tergolong rendah. Rendahnya penerimaan PAD ini diindikasikan karena terbatasnya ketersediaan sarana akomodasi dan terbatasnya fasilitas pariwisata yang tersedia. Dalam rangka peningkatan PAD di tahun yang akan datang maka pemerintah daerah perlu melakukan beberapa upaya-upaya ekstensifikasi maupun intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah (LKPJ Kabupaten Bangli, 2014). Berikut ini adalah komponen-komponen yang mempengaruhi PAD, yaitu dapat dilihat di Tabel 4.

Tabel 4. Komponen Pendukung Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali periode 2010-2014 (dalam Juta Rupiah)

No.	Komponen PAD	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014

1	Pajak daerah	1.221	1.494.	1.682	2.202	2.517
2	Retribusi Daerah	20	3.354	31	32	71
3	BUMD dan Kekayaan daerah yang dipisahkan	60	70	96	106	89
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	90	125	159	189	241
	Total PAD	1.393	1.723	1.969	2.529	2.920

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015

Berdasarkan Tabel 4 komponen utama pendukung PAD adalah dari Pajak Daerah dan retribusi daerah. Hal ini karena penerimaan daerah melalui pajak mencakup sekitar 90 persen dari pendapatan rutin yang diterima daerah (Suparmoko, 2002). Oleh karena itu pajak daerah harus dikelola secara profesional dan transparan dalam rangka optimalisasi dan usaha meningkatkan kontribusinya terhadap PAD melalui intensifikasi pemunggutannya dan ekstensifikasi subyek dan objek pajak daerah (Halim, 2006). Salah satu faktor penentu perkembangan PAD adalah perkembangan industri pariwisata. Pajak daerah di provinsi Bali terdiri dari hotel, restoran, hiburan, penerangan jalan, parkir, reklame, air tanah pajak bumi bangunan (PBB) dan bea perolehan atas hak tanah dan bangunan (BPHTB). Jika dilihat dari persentasenya, realisasi APBD Provinsi Bali Tahun 2010 dan 2014 dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Ringkasan Realisasi APBD Provinsi Bali Tahun 2010 dan 2014 (dalam persen)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	2010	2014
I. Penerimaan Daerah	100	100
1. Pendapatan Asli Daerah	100	100
1.1. Pajak Daerah	87.6	86.2
1.2. Retribusi Daerah	1.5	2.4
1.3. Hasil perusahaan dan kekayaan milik daerah	4.4	3.1
1.4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	6.5	8.3
2. Dana Perimbangan	100	100

2.1. Dana hasil pajak/Bukan pajak	23.3	14.2
2.2. DAU	75.5	81.7
2.3. DAK	1.2	4.1
3. Lain-lain pendapatan yang sah	100	100
II. Belanja Daerah	100	100
1. Belanja langsung	24.7	70.2
2. Belanja tidak langsung	75.3	29.8
III. Pembiayaan Pemerintah Daerah	100	100
1. Penerimaan Pembiayaan Daerah	119	126.8
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	19	26.8
IV. SILPA	100	100

Sumber: data diolah dari Tabel 1.2, 2015

Berdasarkan Tabel 5 menunjukkan bahwa diantara empat sumber atau komponen pendukung PAD, pajak daerah yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, dan pajak parkir.

Pajak tersebut jika digabungkan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap penerimaan PAD pada tahun 2010, yaitu sebesar 87,6 persen dari 100 persen total PAD. Sedangkan sisanya 1,5 persen adalah bersumber retribusi daerah yang bersumber dari 3 jenis retribusi yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu. Hasil perusahaan dan kekayaan milik daerah yang dirinci menurut menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD dan negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat berkontribusi sebesar 4,4 persen dan 6,5 persen berupa lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang di klasifikasikan dengan hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang

asing, komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang ataupun jasa oleh pemerintah.

Pada tahun 2014 kontribusi pajak daerah terhadap PAD mengalami penurunan sebesar 1,4 persen yaitu sebesar 86,2 persen dari 100 persen total PAD. Sedangkan komponen pendukung lainnya masing-masing memberikan kontribusi sebesar 2,4 persen dari retribusi daerah, 3,1 persen dari hasil perusahaan kekayaan milik daerah, 8,3 persen dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Jadi jika dibandingkan APBD Provinsi Bali pada tahun 2010 dan 2014 hanya pajak daerah yang mengalami penurunan, sedangkan komponen pendukung PAD lainnya mengalami kenaikan dari tahun 2010 ke tahun 2014.

Ringkasan realisasi APBD 2010 juga mencatat dana hasil pajak/bukan pajak, dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) yang merupakan komponen dari dana perimbangan. Dari total 100 persen dana perimbangan tersebut, masing-masing komponennya berkontribusi sebesar 23.3 persen dari dana hasil pajak/bukan pajak, 75.5 persen dari DAU dan sisanya 1,2 persen di dapat dari DAK. Jika dibandingkan dengan APBD tahun 2014, dana hasil pajak/bukan pajak berkontribusi lebih kecil dari tahun 2010 yaitu sebesar 14,2 persen, sedangkan DAU dan DAK berkontribusi lebih besar dari tahun 2010 yaitu masing-masing sebesar 81,7 persen dan 4.1 persen untuk dana perimbangan.

Belanja daerah merupakan penurunan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus keluar, atau deflasi aset, atau terjadinya hutang yang mengakibatkan berkurangnya ekuitas dana selain yang berkaitan dengan distribusi kepada para peserta ekuitas dana (Halim, 2002:73). Belanja

daerah dibagi lagi menjadi 2, yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung mencapai 24,7 persen dan belanja tidak langsung mencapai 75,3 persen dari total 100 persen belanja daerah pada APBD tahun 2010. Pada tahun 2014 belanja langsung mencapai 70,2 persen dan belanja tidak langsung mencapai 29,8 persen dari 100 persen total belanja daerah.

Pembiayaan daerah adalah transaksi keuangan untuk menutup defisit anggaran atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan pemerintah daerah dibagi menjadi 2, yaitu penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Pada tahun 2010 dan 2014 masing-masing penerimaan pembiayaan daerah adalah sebesar 119 persen dan 126,8 persen, sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan daerah tercatat masing-masing sebesar 19 persen dan 26,8 persen. Selanjutnya untuk mengetahui realisasi APBD Provinsi Bali tahun 2010 dan 2014 dapat dilihat pada Tabel 6. Berdasarkan Tabel 1.6 pada tahun 2010 dan 2014 PAD merupakan penyumbang kontribusi terbesar untuk penerimaan daerah di Provinsi Bali. PAD pada tahun tersebut berkontribusi masing-masing sebesar 62,3 persen dan 63,8 persen. Terjadi peningkatan sebesar 1,5 persen dari tahun 2010 ke tahun 2014. Sedangkan dana perimbangan mencapai 29 persen pada tahun 2010 dan 22,2 persen pada tahun 2014 serta lain-lain pendapatan yang sah mencapai 8,7 persen pada tahun 2010 dan 14 persen pada tahun 2014 dari total 100 persen penerimaan daerah.

Tabel 6. Ringkasan Realisasi APBD Provinsi Bali Tahun 2010 dan 2014 (dalam persen)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	2010	2014
I. Penerimaan Daerah	100	100
1. Pendapatan Asli Daerah	62.3	63.8
1.1. Pajak Daerah	54.6	55
1.2. Retribusi Daerah	0.9	1.5
1.3. Hasil perusahaan dan kekayaan milik daerah	2.7	2
1.4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	4.1	5.3
2. Dana Perimbangan	29	22.2
2.1. Dana hasil pajak/Bukan pajak	6.7	3
2.2. DAU	21.9	18.2
2.3. DAK	0.4	1
3. Lain-lain pendapatan yang sah	8.7	14
II. Belanja Daerah	88.7	98.1
1. Belanja langsung	22	68.9
2. Belanja tidak langsung	66.7	29.2
III. Pembiayaan Pemerintah Daerah	20.2	17.9
1. Penerimaan Pembiayaan Daerah	24	22.7
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	3.8	4.8
IV. SILPA	31.5	19.8

Sumber: data diolah dari Tabel 1.2, 2015

Belanja daerah mencapai 88,7 persen dan pembiayaan pemerintah daerah mencapai 20,2 persen pada tahun 2010. Dalam tabel 1.6 terlihat bahwa realisasi penerimaan pembiayaan daerah pada tahun 2014 mencapai 24 persen dan pengeluaran pembiayaan daerah mencapai 3,8 persen.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenan atau yang selanjutnya disingkat SILPA merupakan selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Jadi jika dilihat jumlah penerimaan daerah tahun 2010 yaitu sebesar 100 persen dan jika dikurangkan dengan belanja daerah yaitu sebesar 88,7 persen akan menghasilkan selisih yaitu sebesar 1,3 persen. Tahun 2014 penerimaan daerah sebesar 100 persen dan dikurangkan dengan belanja daerah yaitu sebesar 98,1 persen maka akan menghasilkan selisih yaitu sebesar 1,9 persen. Dari perhitungan APBD tahun 2010 dan 2014 tersebut diketahui bahwa

masing-masing mengalami surplus APBD sebesar 1,3 persen dan 1,9 persen yang artinya penerimaan daerah lebih besar dari belanja daerah. Dalam penyusunan APBD angka SILPA yang sama dengan nol menunjukkan bahwa penerimaan pembiayaan daerah mampu menutupi surplus/defisit anggaran yang terjadi. Perkembangan penerimaan pajak hotel dan restoran pada masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Bali secara rinci dari periode 2010-2014 dijabarkan pada Tabel 7.

Tabel 7. Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Kabupaten/Kota di Provinsi Bali periode 2010-2014 (dalam Juta Rupiah)

No.	Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014
1	Jembrana	4.951	9.047	10.013	18.512	20.312
2	Tabanan	13.066	15.252	16.664	56.444	59.889
3	Badung	713.206	853.142	947.775	853.142	876.887
4	Gianyar	62.932	79.109	86.104	631.879	99.890
5	Klungkung	169.139	179.011	187.680	203.142	205.234
6	Bangli	316.767	264.905	165.082	240.589	224.771
7	Karangasem	13.062	17.437	16.768	23.600	56.788
8	Buleleng	6.859	7.461	10.783	47.982	53.998
9	Denpasar	115.461	131.528	149.989	170.082	235.889

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015

Tabel 7 menunjukkan bahwa Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Kabupaten/Kota di Provinsi Bali periode 2010-2014 mengalami fluktuasi. Kabupaten Badung rata-rata selalu dengan urutan pertama setiap tahunnya dalam penerimaan PHR, di tahun 2014 sebesar Rp. 876.887 juta rupiah, disusul oleh Kota Denpasar dengan urutan kedua sebesar Rp. 235.889 juta rupiah dan terendah adalah Kabupaten Jembrana yaitu sebesar Rp. 20.312 juta rupiah. Salah satu yang menjadi penyebab dari peningkatan atau penurunan pajak hotel dan restoran adalah jumlah kunjungan wisatawan (Widiastuti, 2014). Berikut ini adalah perkembangan jumlah kunjungan wisatawan ke Bali yang dapat dilihat dari Tabel 8.

Tabel 8. Jumlah wisatawan yang berkunjung pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali periode 2010-2014 (dalam satuan orang)

No	Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014
1	Jembrana	318.380	397.669	398.025	443.775	478.795
2	Tabanan	1.141.100	1.377.711	1.851.521	1.967.400	2.067.090
3	Badung	2.787.659	3.336.037	4.184.175	3.716.376	3.316.316
4	Gianyar	592.115	592.115	819.917	853.530	864.522
5	Klungkung	280.871	242.612	245.199	298.979	328.079
6	Bangli	54.846	89.496	98.859	134.039	144.059
7	Karangasem	351.343	447.981	462.233	461.515	459.602
8	Buleleng	418.143	488.933	548.116	616.637	617.677
9	Denpasar	571.869	562.616	743.196	638.147	688.105

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015

Berdasarkan Tabel 8 dapat dilihat kunjungan wisatawan ke masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Bali terus mengalami peningkatan. Kabupaten yang menjadi tujuan wisatawan yang paling utama adalah Kabupaten Badung, yaitu hingga tahun 2014 jumlah kunjungan wisatawan mencapai 3.316.316 orang. Hal ini karena Badung merupakan daerah wisatawan yang sudah terkenal hingga ke mancanegara dan memiliki daya tarik wisata. Kabupaten dengan kunjungan wisatawan terendah adalah Kabupaten Bangli yaitu sekitar 144.059 orang di Tahun 2014. Faktor yang mempengaruhi perkembangan kunjungan wisatawan adalah jumlah penduduk.

Jumlah penduduk menjadi salah satu indikator penting bagi suatu negara. Adam Smith (dalam Santosa dan Rahayu, 2005) menjelaskan bahwa pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat menaikkan output melalui penambahan tingkat dan ekspansi pasar baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Selanjutnya, Santosa dan Rahayu (2005) menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk yang tinggi dan disertai dengan perubahan teknologi akan mendorong tabungan dan juga penggunaan skala ekonomi di dalam produksi. Penambahan penduduk merupakan suatu hal yang dibutuhkan dan bukan suatu masalah, melainkan

sebagai unsur penting yang dapat memacu pembangunan ekonomi. Jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan dalam hal ini PAD juga akan meningkat.

Besarnya Pendapatan Asli Daerah dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk, jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang ditarik juga akan meningkat (Simanjuntak, 2001). Menurut, *Population Reference Bureau* (2011), Penduduk merupakan sumber daya utama yang berpengaruh besar terhadap pembangunan di suatu wilayah. Ketersediaan SDM atau tenaga kerja terdidik, merupakan salah satu faktor yang akan mendukung percepatan pertumbuhan perekonomian. Hal ini sejalan dengan penelitian Yusuf (2015) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan yang dimiliki peran penting dalam pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) pengaruh langsung pajak hotel dan restoran dan jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali periode 2010-2014, 2) pengaruh langsung pajak hotel dan restoran, jumlah penduduk dan Pendapatan Asli Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali periode 2010-2014, 3) pengaruh tidak langsung pajak hotel dan restoran, jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi melalui Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali periode 2010-2014.

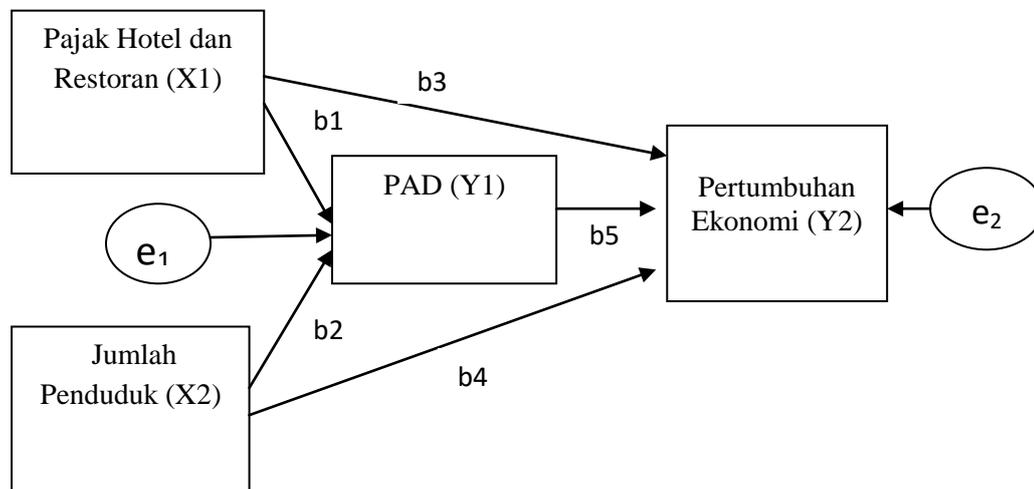
METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dengan mencari data-data pajak hotel dan restoran, jumlah penduduk, PAD dan Pertumbuhan Ekonomi di Badan Pusat Statistik Provinsi Bali periode 2010-2014.

Data yang digunakan didalam penelitian ini adalah data *time series* selama 5 tahun. Objek penelitian terdiri dari pajak hotel dan restoran, jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi dan PAD sebagai variabel intervening pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali periode 2010-2014.

Tekhnik analisis data yang digunakan didalam penelitian ini adalah analisis jalur/*path analysis*. Analisis jalur adalah suatu tekhnik yang digunakan untuk menganalisis antar variabel baik secara langsung maupun tidak langsung antara variabel terikat dengan variabel bebas. Analisis jalur dikembangkan sebagai metode untuk mempelajari pengaruh secara langsung dan tidak langsung antar *variable exogenous* dan *endogenous* (Panji, 2016).

Gambar 1. Desain Penelitian Analisis Jalur



Keterangan:

- X1 = Pajak Hotel dan Restoran
- X2 = Jumlah penduduk
- Y1 = PAD
- Y2 = Pertumbuhan Ekonomi
- b1, b2, ...b5 = Koefisien Jalur
- e1 = standar error

Berdasarkan Gambar 1, maka diperoleh pengaruh PHR dan jumlah penduduk terhadap PAD, yang dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan :

Struktural 1 :

$$Y1 = b1X1 + b2X2 + e1 \dots\dots\dots(1)$$

Pengaruh PHR, jumlah penduduk dan PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi, yang dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan:

Struktural 2 :

$$Y2 = b3X1 + b4X2 + b5Y1 + e2 \dots\dots\dots(2)$$

Pengujian pengaruh tidak langsung suatu variabel bebas terhadap variabel terikat melalui variabel intervening dapat dilakukan dengan metode uji sobel (Utama, 2012), yaitu sebagai berikut:

- a) PHR (X1) berpengaruh secara tidak langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y2) melalui variabel intervening PAD (Y1) di Provinsi Bali.
- b) Jumlah Penduduk (X2) berpengaruh secara tidak langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y2) melalui variabel intervening PAD (Y1) di Provinsi Bali.

Untuk menguji signifikansi pengaruh tidak langsung , dapat dilakukan dengan menghitung nilai z dari koefisien ab dengan rumus sebagai berikut.

$$Z = \frac{b1b5}{Sb1b5} \dots\dots\dots(3)$$

$$Z = \frac{b2b5}{Sb2b5} \dots\dots\dots(4)$$

Standar error koefisien b1 dan b5 ditulis dengan Sb1 dan Sb5, sedangkan besarnya standar error tidak langsung (*indirect effect*) Sb1b5 dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$S_{b_1b_5} = \sqrt{b_5^2 S_{b_1}^2 + b_1^2 S_{b_5}^2} \dots\dots\dots(5)$$

Standar error koefisien b2 dan b5 di tulis dengan Sb2 dan Sb5 besarnya setandar error tidak langsung (*indirect effect*) Sb2b5 di hitung dengan rumus sebagai berikut:

$$S_{b_2b_5} = \sqrt{b_5^2 S_{b_2}^2 + b_2^2 S_{b_5}^2} \dots\dots\dots(6)$$

Keterangan :

- b1 = Koefisien tak standar pengaruh PHR terhadap PAD.
- b2 = Koefisien tak standar pengaruh jumlah penduduk terhadap PAD.
- b5 = Koefisien tak standar pengaruh PHR terhadap pertumbuhan ekonomi.
- Sb1=Standar error pengaruh PHR terhadap pertumbuhan ekonomi.
- Sb2=Standar error pengaruh jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi.
- Sb5=Standar error pengaruh PAD terhadap pertumbuhan ekonomi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Langsung antar Variabel

Pengaruh langsung antar variabel penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh PHR, jumlah penduduk dan PAD terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali, dimana koefisien jalur pada penelitian diperoleh dari perhitungan regresi dengan metode *Ordinary Least Square (OLS)*.

Tabel 9. Pengaruh Langsung

Hubungan Variabel	Koefisien Regresi		St. Error	t	Sig	Keterangan
	Takstandar	Standar				
X1 → Y1	0,003	0,714	0,000	6,824	0,000	Signifikan
X2 → Y1	0,001	0,145	0,001	1,391	0,172	Tidak Signifikan
X1 → Y2	0,001	0,336	0,000	2,856	0,017	Signifikan
X2 → Y2	0,001	0,297	0,000	-3,417	0,033	Signifikan
Y1 → Y2	0,086	0,235	0,049	-2,968	0,036	Signifikan

Sumber: Data penelitian diolah, 2016

Keterangan:

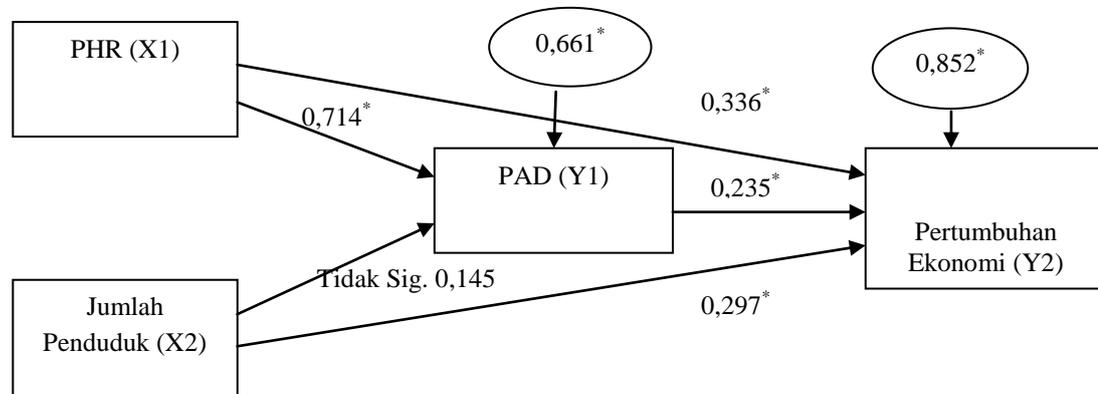
- X1 = PHR (juta rupiah)
- X2 = Jumlah penduduk (ribu orang)
- Y1 = PAD (perkapita)
- Y2 = Pertumbuhan ekonomi (%)

Perhitungan R^2_m

$$\begin{aligned}
 R^2_m &= 1 - (Pe_1)^2 - (Pe_2)^2 \\
 &= 1 - (0.661)^2 - (0.852)^2 \\
 &= 0,683
 \end{aligned}$$

Hasil perhitungan koefisien determinasi total, maka diperoleh bahwa keragaman data yang dapat dijelaskan oleh model adalah sebesar 0,683 atau dengan kata lain informasi yang terkandung dalam data sebesar 68,3 persen dapat dijelaskan oleh model, sedangkan sisanya yaitu 31,7 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam model.

Gambar 2. Koefisien Jalur Hubungan Antar Variabel



Sumber : Tabel 9

Hasil analisis menunjukkan nilai *standardized coefficient beta* sebesar 0.714 dan nilai probabilitas sebesar $0.000 < 0.05$, ini berarti H_1 diterima. Artinya PHR berpengaruh positif dan langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hubungan signifikan PHR terhadap Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan hasil penelitian Suartini (2013), menyatakan pajak hotel dan restoran berpengaruh signifikan terhadap PAD Gianyar. Aliran pembayaran pajak oleh perusahaan kepada pemerintah akan mempengaruhi pendapatan kepada pihak pemerintah dan merupakan sumber pendapatan yang utama terhadap penerimaan negara yang akan berkontribusi dari pajak hotel dan restoran dapat mempengaruhi tinggi atau rendahnya PAD. Menurut Marteen, *et all* (2001) dan Robert (2002), menjelaskan bahwa peranan sektor pajak daerah dan retribusi yang paling besar kontribusinya terhadap PAD, yang dimana pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah itu sendiri.

Hasil analisis menunjukkan nilai *standardized coefficient beta* sebesar 0.145 dan nilai probabilitas sebesar $0.172 > 0.05$, ini berarti H_2 ditolak. Artinya jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Asmuruf (2015), yang menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Hasil penelitiannya mendapatkan nilai koefisien regresi untuk variabel jumlah penduduk sebesar 14,842 maka hal ini mengandung arti jika jumlah penduduk meningkat sebesar 1% maka PAD akan meningkat sebesar 14,842 %.

Tidak berpengaruhnya jumlah penduduk terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah diindikasikan terjadi karena peningkatan atau penurunan jumlah penduduk bukanlah faktor yang akan mempengaruhi penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Sumber-sumber PAD yang utama adalah penerimaan yang diperoleh sebagai sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Mardiasmo, 2002: 132). Selain itu tidak berpengaruhnya jumlah penduduk terhadap PAD juga terjadi karena sebagian besar pengguna fasilitas kepariwisataan seperti hotel dan restoran adalah wisatawan asing bukan dari penduduk daerah tersebut, dan jika ada hanya sebagian kecil penduduk saja yang menggunakan jasa tersebut. Penduduk asli yang mendiami suatu daerah cenderung jarang mengunjungi restoran untuk makan atau menginap di hotel. Hal inilah yang menyebabkan penduduk tidak berpengaruh terhadap PAD, karena salah satu komponen penyumbang PAD terbesar adalah dari pajak hotel dan restoran.

Hasil analisis menunjukkan nilai *standardized coefficient beta* sebesar 0.336 dan nilai probabilitas sebesar $0.017 < 0.05$, ini berarti H_3 diterima. Artinya PHR berpengaruh positif dan langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Peacock dan Wiseman, mengenai hubungan penerimaan pajak dengan penerimaan ekonomi. Dijelaskan bahwa perkembangan ekonomi menyebabkan pemunggutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah akan memberikan dampak pada meningkatnya penerimaan pajak sehingga menyebabkan pengeluaran pemerintah

juga semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, meningkatnya pertumbuhan ekonomi menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar pula (Mangkoesobroto, 1993: 173). Hal ini didukung oleh hasil penelitian Ardiana dkk (2010), yang menyatakan bahwa negara dalam membiayai pengeluaran belanja pembangunan atau modal untuk meningkatkan pertumbuhannya bersumber dari penerimaan pajak.

Hasil analisis menunjukkan nilai *standardized coefficient beta* sebesar 0.297 dan nilai probabilitas sebesar $0.033 < 0.05$, ini berarti H_4 diterima. Artinya jumlah penduduk berpengaruh positif dan langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh fertilitas, mortalitas dan migrasi. Tingkat fertilitas yang tinggi memacu pertumbuhan penduduk secara cepat, dan dalam jangka panjang dapat menciptakan tenaga kerja yang dapat membantu pertumbuhan ekonomi, jika selama masa tunggu jangka panjang tersebut calon tenaga kerja mendapat pendidikan dan ketrampilan yang baik sehingga kualitas sumber daya manusianya baik. Sebaliknya, jika tingkat fertilitas rendah maka tenaga kerja produktif yang diharapkan akan membantu peningkatan pertumbuhan ekonomi pun menjadi tidak tersedia, dan berpengaruh tidak baik bagi pertumbuhan ekonomi.

Faktor migrasi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi ketika migrasi yang masuk di suatu daerah diisi oleh tenaga kerja yang mempunyai produktivitas yang baik. sebaliknya, jika tenaga kerja hanya menjadi pengangguran di daerah yang didatangi, maka akan menjadi beban bagi perekonomian daerah tersebut dan

menurunkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Ketidakseimbangan dalam penyebaran penduduk antar daerah mengakibatkan tidak proporsionalnya penggunaan tenaga kerja secara regional dan sektoral sehingga akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi (Purba, 2008).

Hasil analisis menunjukkan nilai *standardized coefficient beta* sebesar 0.235 dan nilai probabilitas sebesar $0.036 < 0.05$, ini berarti H_5 diterima. Artinya Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Brata (2004), Suwandika (2015) dan Laksmi (2013) yang menyatakan PAD berpengaruh positif dengan pertumbuhan ekonomi di daerah. Artinya apabila peningkatan PAD diukur dengan perannya untuk mengatur perekonomian masyarakat agar dapat lebih berkembang yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan PAD yang tinggi cenderung memiliki tingkat pendapatan per kapita yang lebih baik. Salah satu tujuan utama dari desentralisasi fiskal adalah terciptanya kemandirian daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu mengali sumber-sumber keuangan lokal, khususnya melalui Pendapatan Asli Daerah (Sidik, 2002).

PAD merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah, jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi – potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pendapatan Asli Daerah yang tinggi akan

digunakan untuk membiayai belanja-belanja untuk pembangunan daerah yang selanjutnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah (Tambunan, 2006).

Pengaruh Tidak Langsung

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh tidak langsung PHR dan jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi melalui PAD di Provinsi Bali, dimana koefisien jalur penelitian melalui uji sobel, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 10. Pengaruh Tidak Langsung

Hubungan Variabel	Variabel Mediasi	Ab	Sab	z hitung	z kritis	Keterangan
X1 → Y2	Y1	0,003	0,035	4,794	1,64	Signifikan
X2 → Y2	Y1	0,001	0,007	4,868	1,64	Signifikan

Sumber: Data penelitian diolah

Keterangan:

- X1 = PHR (juta rupiah)
- X2 = jumlah penduduk (ribu orang)
- Y1 = PAD (perkapita)
- Y2 = Pertumbuhan ekonomi (%)

Berdasarkan Tabel 10, dapat dilihat bahwa koefisien PHR sebesar 0,003 artinya apabila PHR naik 1 juta rupiah maka PAD akan bertambah 0,003 juta rupiah per kapita. Koefisien jumlah penduduk sebesar 0,001 artinya apabila jumlah penduduk naik 1 ribu orang maka PAD akan bertambah 0,001 juta rupiah per kapita. Namun kedua koefisien ini tidak dapat digunakan untuk membandingkan pengaruh masing-masing terhadap PAD karena ukuran yang digunakan berbeda yaitu PHR menggunakan ukuran juta rupiah, PAD menggunakan ukuran juta rupiah per kapita dan jumlah penduduk menggunakan ribu orang. Karenanya digunakan *standardized coefficients* untuk membandingkan besaran pengaruhnya.

Nilai satu standar deviasi dari PHR dan jumlah penduduk yang digunakan adalah masing-masing sebesar 284.822 juta rupiah dan 202 ribu orang. *Standardized coefficients* PHR sebesar 0,714 artinya apabila PHR naik sebesar 284.822 juta rupiah maka PAD akan naik sebesar 0,85 juta rupiah per kapita, demikian juga untuk *standardized coefficients* jumlah penduduk sebesar 0,145 artinya apabila jumlah penduduk naik sebesar 202 ribu orang maka PAD akan naik sebesar 0,17 juta rupiah per kapita. Dari kedua koefisien ini dapat dikatakan bahwa pengaruh PHR (0,714) lebih besar daripada pengaruh jumlah penduduk (0,145) terhadap perubahan PAD.

Koefisien PHR sebesar 0,001 artinya apabila PHR naik 1 juta rupiah maka pertumbuhan ekonomi akan bertambah 0,001 persen. Koefisien jumlah penduduk sebesar 0,001 artinya apabila jumlah penduduk naik 1 ribu orang maka pertumbuhan ekonomi akan bertambah 0,001 persen. Koefisien PAD sebesar 0,086 artinya apabila PAD naik sebesar 1 juta rupiah per kapita maka pertumbuhan ekonomi akan bertambah 0,086 persen. Namun tiga koefisien ini tidak dapat digunakan untuk membandingkan pengaruh masing-masing terhadap pertumbuhan ekonomi karena ukuran yang digunakan berbeda yaitu PHR menggunakan ukuran juta rupiah, PAD menggunakan ukuran juta rupiah per kapita, jumlah penduduk menggunakan ribu orang dan pertumbuhan ekonomi menggunakan persen. Karenanya digunakan *standardized coefficients* untuk membandingkan besaran pengaruhnya.

Nilai satu standar deviasi dari PHR, jumlah penduduk dan PAD yang digunakan adalah masing-masing sebesar 284.822 juta rupiah, 202 ribu orang dan

1,196 juta rupiah per kapita. *Standardized coefficients* PHR sebesar 0,336 artinya apabila PHR naik sebesar 284.822 juta rupiah maka pertumbuhan ekonomi akan naik sebesar 0,5 persen, *standardized coefficients* jumlah penduduk sebesar 0,297 artinya apabila jumlah penduduk naik sebesar 202 ribu orang maka pertumbuhan ekonomi akan naik sebesar 0,4 persen demikian juga *standardized coefficients* PAD sebesar 0,235 artinya apabila PAD naik sebesar 1,196 juta rupiah per kapita maka pertumbuhan ekonomi akan naik sebesar 1,76 persen. Dari ketiga koefisien ini dapat dikatakan bahwa pengaruh PAD (0,235) lebih besar daripada pengaruh PHR (0,336) dan jumlah penduduk (0,297) terhadap pertumbuhan ekonomi.

Nilai kekeliruan taksiran standar e_1 sebesar 0,661 dan e_2 sebesar 0,852. Pengaruh tidak langsung PHR terhadap pertumbuhan ekonomi melalui PAD sebesar 0.035, mempunyai arti bahwa pengaruh tidak langsung PHR terhadap pertumbuhan ekonomi melalui PAD adalah sebesar 3,5 persen. Nilai pengaruh tidak langsung jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi melalui PAD sebesar 0.007, mempunyai arti bahwa pengaruh tidak langsung jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi melalui PAD sebesar 0,7 persen.

Hasil ini menunjukkan PAD adalah variabel intervening PHR dan jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini sesuai dengan pernyataan dari Mardiasmo (2000), yang menyatakan pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang diperoleh sebagai sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pajak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pajak hotel dan restoran. Peningkatan pendapatan asli

daerah diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah tersebut menjadi lebih baik dan dapat menciptakan pemerataan pembangunan ekonomi.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi simpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) PHR berpengaruh langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah yang berarti, setiap terjadi peningkatan penerimaan PHR akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Sedangkan jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah yang berarti, peningkatan atau penurunan jumlah penduduk tidak mempengaruhi penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, 2) PHR, jumlah penduduk dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi yang berarti, setiap terjadi peningkatan PHR, jumlah penduduk dan Pendapatan Asli Daerah akan meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, 3) PHR dan jumlah penduduk memiliki pengaruh tidak langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Pendapatan Asli Daerah yang ditunjukkan dengan Pendapatan Asli Daerah yang merupakan variabel intervening.

Saran

Berdasarkan hasil analisis dan simpulan di atas maka dapat diajukan saran yaitu dalam upaya peningkatan penerimaan PHR sangat diperlukan dalam

meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Daerah sebaiknya meningkatkan penerimaan PHR dengan cara menggali potensi obyek wisata daerah dan lebih tegas dalam pemungutan pajak hotel restoran. Selain itu pemerintah juga perlu memberikan pelatihan-pelatihan kepada penduduk usia produktif agar memiliki keahlian dan lebih kompeten sehingga mampu menjadi penggerak pembangunan.

REFERENSI

- Andirfa, Mulia. 2009. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang sah terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Skripsi*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala Darussalam. Banda Aceh.
- Ardiana, Rezka Prakarsa dkk. 2010. Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak, Belanja Pembangunan/Modal dan Tingkat Inflasi Terhadap Pertumbuhan ekonomi di Indonesia Selama Tiga Dekade Terakhir. *Jurnal Veteran*. Universitas Pembangunan Nasional. Surabaya.
- Brata, Aloysius Gunadi, 2004 *Komposisi Penerimaan Sektor Publik dan Pertumbuhan Ekonomi Regional*. Lembaga Penelitian Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Halim, Abdul dan Sukriy Abdullah. 2006. Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 2(2): h:17-32.
- KPPOD, Tim Peneliti. 2002. Peningkatan Daya Tarik Investasi 134 Kabupaten/Kota di Indonesia. *Laporan Pelaksanaan Pemantauan Otonomi Daerah*. Jakarta.
- Laksmi Dewi, Sakita. 2013. Pengaruh PAD, PMA, Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 2(11), h: 502-512.
- Lin, Justin Yifu dan Zhiqiang Liu. 2000. *Fiscal Decentralization And Economic Growth In China*. *Journal of Economic Development And Cultural Change*, 49(1): pp:263-275.

- Malik, Shahnawaz, Mahmood-ul-hassan and Shahzad Hussain. 2006. Fiscal Decentralization and Economic Growth in Pakistan. *The Pakistan Development of Journal*, 45(4): pp:845-854.
- Mangkoesoebroto, Guritno. 1993. *Ekonomi Publik. Edisi Ketiga. Cetakan pertama*. BPFE. Yogyakarta
- Manurung, Mandala. 2008. Teori Ekonomi Makro Edisi Keempat. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajaemen Keuangan Daerah*. Penerbit ANDI.
- Martteen, et all. 2001. Partisan Influence On the Local Tax Burden In The Netherland. Public Choise. *Jurnal of Economic*, 10(6): pp: 351-363.
- Nelly, Nur Laili. 2007. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi DIY Tahun 1990-2004. *Skripsi*. Universitas Islam Indonesia.
- Panji, P., dan Gusti Ketut Indrajaya. 2016. Pengaruh Dana Perimbangan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 5 (3) :316:337.
- Population Reference Bureau. 2011. *United States & International Profiles*, (Online), (<http://www.prb.org/DataFinder/Geography/Data.aspx?loc=395>, diakses 2016).
- Purba, Marisi P. 2008. *International Financial Reporting Standards Konvergensi dan Kendala Aplikasinya di Indonesia*. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Robert A Simanjuntak. 2002. Evaluation Creteria an the Efforts to Increase Local Tax Base A Case Study of Indonesia Decentralizing Era. *Journal of Georgia State University*. Atalanta.
- Santosa, Budi Purbayu & Rahayu, Retno Puji. 2005. Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kediri. *Jurnal*. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Sianturi, Agave. 2010. Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten / Kota Di Sumatera Utara. *Skripsi*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Sidik, Machfud. 2002. *Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah Sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal (Antara Teori dan Aplikasinya di Indonesia)*. Jogjakarta.

- Simanjuntak, Payaman J. 2001. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia Edisi 2001*. FEUI, Jakarta.
- Sukirno, Sadono. 2002. *Ekonomi Pembangunan Proses Masalah dan Dasar Kebijaksanaan*. UI-Press. Jakarta.
- Suparmoko, M. 2002. *Ekonomi Publik, Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Andi. Yogyakarta.
- Suwandika, P., dan Nyoman Mahaendra Yasa. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Pengangguran Di Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Unud*, 4 (7), h:794-810.
- Suartini, Ni Nyoman dan Made Suyana Utama. 2013. Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gianyar. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Unud*. Vol 2 No 3.
- Tambunan, Tulus. 2006. *Upaya-Upaya Meningkatkan Daya Saing Daerah*. [diunduh pada tanggal 14 Januari 2015, melalui: www.kardin-indonesia.or.id].
- Utama, Made Suyana. 2012. *Aplikasi Analisis Kuantitatif*. 2012. Denpasar : Udayana University Press.
- Wahyuni, Putri Ayu. 2014. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*. Vol 3 No 8.
- Widiana, I Nyoman Wahyu dan I Ketut Suidiana. 2015. Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Pajak Hotel Restoran Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 4(11) h: 1357-1390.
- Widiastuti, Ni Komang. 2013. Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Kinerja Keuangan Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 2(5) h: 292-311.
- Yusuf, Arief Anshory and Andy Sumner. 2015. Growth, Poverty, and Inequality under Jokowi. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. 51 (3) 324-348.